

ABSTRAK

PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PEREMPUAN DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus di Polsek Sukarame Bandar Lampung)

Oleh

Ririn Wijayanti

Kekerasan seksual adalah tindakan menyimpang yang berdampak buruk bagi korban, baik fisik maupun psikologis. Anak perempuan penyandang disabilitas menjadi kelompok paling rentan karena keterbatasan mereka kerap dianggap lemah dan tidak mampu membela diri. Oleh karena itu, perlu kajian komprehensif mengenai perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban. Dalam skripsi ini dibahas beberapa permasalahan, yaitu Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum terhadap anak perempuan disabilitas korban kekerasan seksual dan apakah faktor yang menghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak disabilitas korban kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polsek Sukarame Bandar Lampung, perwakilan dari Perkumpulan DAMAR Lampung, serta dosen Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai isu yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana sejak awal. Salah satu wujud nyata dari perlindungan ini adalah keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua peraturan ini menjadi dasar langkah preventif yang diambil pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum. Sementara itu, perlindungan hukum secara represif diberikan setelah terjadi pelanggaran, dengan tujuan memberikan sanksi hukum kepada pelaku dan pemulihan terhadap korban.

Ririn Wijayanti

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 59, disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak, termasuk mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam pelaksanaannya, terdapat lima faktor utama yang menghambat proses perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, yaitu faktor peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, budaya dan masyarakat. Dari kelima faktor tersebut, hambatan paling dominan terletak pada aspek sarana dan fasilitas. Keterbatasan dalam hal operasional, minimnya dukungan anggaran untuk perawatan kesehatan, serta belum tersedianya ruang khusus bagi anak korban, menjadi tantangan besar yang menghambat perlindungan hukum secara maksimal.

Peneliti menyarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan sinergi dalam memberikan perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif, kepada anak perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hambatan yang ada serta memperbaiki sarana dan prasarana, terutama infrastruktur dan layanan pendukung, guna menjamin perlindungan yang optimal dan merata.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Perempuan Disabilitas, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION FOR GIRLS WITH DISABILITIES AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE. (Case Study at Sukarame Police Sector, Bandar Lampung)

By

Ririn Wijayanti

Sexual violence is a deviant act that has severe impacts on victims, both physically and psychologically. Girls with disabilities are among the most vulnerable groups, as their limitations are often perceived as weakness and inability to defend themselves. Therefore, a comprehensive study is needed regarding legal protection and recovery for victims. This thesis discusses several issues, namely: how the implementation of legal protection for girls with disabilities who are victims of sexual violence is carried out, and what factors hinder the provision of such legal protection for children with disabilities who are victims of sexual violence.

This research employs a normative juridical and empirical juridical approach. The data collected consist of primary and secondary data. The informants in this study include investigators from the Women and Children Protection Unit (PPA) of Sukarame Police Sector in Bandar Lampung, representatives from the DAMAR Lampung Association, and a Criminal Law lecturer from the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection techniques were carried out through literature studies and field research. All obtained data were then analyzed qualitatively to provide an in-depth understanding of the issues being studied.

Based on the results of the research and discussion, it was found that preventive legal protection is a form of protection provided with the aim of preventing criminal acts from occurring in the first place. One concrete form of this protection is the enactment of Law Number 35 of 2014, which amends Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, as well as Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. These two regulations serve as the foundation for preventive measures taken by the government in providing legal protection. Meanwhile, repressive legal protection is provided after a violation has occurred, with the aim of imposing legal sanctions on the perpetrator and ensuring recovery for the victim.

Ririn Wijayanti

Based on the Child Protection Law, particularly Article 59, it is stated that the government has the obligation and responsibility to provide special protection for children, including those who are victims of sexual violence. In its implementation, there are five main factors that hinder the process of legal protection for child victims of sexual violence crimes, namely: legislative factors, law enforcement officers, facilities and infrastructure, cultural, and societal factors. Among these, the most dominant obstacle lies in the aspect of facilities and infrastructure. Limitations in operational support, insufficient funding for healthcare services, and the lack of special facilities for child victims pose significant challenges that hinder the optimal implementation of legal protection.

The author suggests that the government and law enforcement authorities strengthen their synergy in providing both preventive and repressive legal protection for girls with disabilities who are victims of sexual violence. The government should also conduct a comprehensive evaluation of the existing obstacles and improve facilities and infrastructure, particularly supportive services and systems, to ensure optimal and equitable protection.

Keywords: Legal Protection, Girls with Disabilities, Sexual Violence